

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan sosial menurut undang-undang nomor 36 tahun 2004 tentang APBN yang terletak pada pasal 1 ayat 17 merupakan seluruh pengeluaran negara dalam bentuk transferan uang atau barang yang disalurkan ke masyarakat melalui kementerian/lembaga, guna menaungi dari kemungkinan terjadi macam resiko sosial. Bantuan ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat guna menghindari terjadinya resiko sosial yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial yang akan berdampak di keluarga, pribadi maupun masyarakat.

Penerimaan Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperbolehkan tercantum pada Peraturan Pemerintahan nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 21 tahun 2011. Dari kedua isi peraturan ini tidak mengecualikan siapa saja calon penerima bantuan sosial yang mana sudah didiskusikan dan disahkan. Sehingga Kepala Daerah diberi tugas menentukan siapa yang menerima dan nominal bantuan pada tahun terkait sesuai dokumen yang diterima dan program dari Kepala Daerah tersebut.

Berdasarkan Permendagri nomor 32 tahun 2011 bagi orang atau organisasi yang menjadi penerima bantuan sosial harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah. Jika disetujui oleh Kepala Daerah, maka itu menjadi landasan dalam pencantuman alokasi anggaran dalam merancang KUA dan PPAS serta akan diproses langsung menjadi APBD. Dan yang terakhir dapat dilakukan pencairan melalui langkah-langkah yang tercantum dalam surat keputusan kepala daerah tentang penepatan nama orang yang menerima beserta alamat penerima Bantuan serta nominal

uang ataupun barang yang akan diterima.

Pada kondisi saat ini, dengan adanya Pandemi Covid-19 terjadi perubahan anggaran Bantuan Sosial di berbagai daerah. Meningkatnya bantuan sosial ini bisa menyebabkan naiknya penganggaran dalam APBN dari tahun sebelumnya. Selain itu, akibat dari Pandemi Covid-19 yaitu berpengaruh sosial di Indonesia. Enda mengatakan bahwa sosial merupakan bagaimana cara para individu saling berhubungan. Jika dikaitkan dengan masyarakat, maka sosial berarti segala sesuatu yang bertalian dengan cara beradaptasi lingkungan dari orang atau sekelompok orang yang didalamnya ada struktur, organisasi hingga nilai-nilai dan aspirasi hidup untuk mencapai sesuatu. Artinya dapat disimpulkan bahwa Covid-19 membuat individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok tidak dapat terlaksana dan dapat disebut juga *physical distancing*.

Selain beberapa dampak tersebut, kehadiran Covid-19 pun berpengaruh pada rendahnya pandangan investor terhadap pasar yang akhirnya mempengaruhi kondisi pasar yang kurang stabil. Selain itu, sektor ekonomi dan perdagangan juga ikut terdampak. Dimana pemberlakuan PSBB mengakibatkan perekonomian di negara maupun daerah menjadi melemah. Bahkan pengaruhnya sampai kepada sektor ekspor Indonesia.

Berdasarkan hasil total dari BPS terhitung tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dimana pada Kuartal I (Januari-Maret) 2020 hanya mencapai 2,97%. Angka ini melambat dari 4,97% pada Kuartal IV 2019. Bisa dibayangkan, pertumbuhan ini jauh dari pencapaian target pada Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07%. Selanjutnya pada Kuartal II Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Angka ini berbanding terbalik dengan Kuartal II Tahun 2019 yang mencapai 5,05%. Perhitungan ekonomi di Indonesia berdasarkan (Produk Domestik Bruto) pada Triwulan II 2020 berdasarkan harga berlaku adalah Rp3.687,7 triliun.

Akan tetapi, berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2010 sebesar Rp2.589,6 triliun. Bila dibandingkan dengan atas dasar harga konstan (*year on year*), maka pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2020 mengalami penurunan -5,32%. Jika dibandingkan dengan Triwulan I 2020, maka penurunan -4,19%. Sementara kumulatifnya terhadap Semester I 2019, pertumbuhan mengalami penurunan -1,26%, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II secara *yoy* cukup dalam. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada Kuartal II 2020.

Selain aspek sosial dan ekonomi, pengaruh wabah pandemi Covid-19 juga mempengaruhi dari segi peningkatan pengangguran di Indonesia. Menurut data yang tercatat di Kemenaker, sebanyak 212.394 pekerja di sektor formal diberhentikan, sementara 1.205.191 pekerja di sektor informal diberhentikan. Di sektor informal, Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa sekitar 282.000 orang tidak memiliki pendapatan. Sementara itu, menurut data BP Jamsostek 454.000 karyawan di sektor formal dan 537.000 di sektor informal terkena dampak PHK.

Selain itu, Indonesia memiliki lebih banyak pekerja di sektor informal dibandingkan di sektor legal, perbedaannya sekitar 71,7 juta atau 56,7% dari keseluruhan angkatan kerja. Menurut data tahun 2018, sebagian besar dari mereka bekerja di usaha mikro, yaitu 89%. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa akibat pandemi covid-19, beberapa departemen bisnis melakukan Pengurangan tenaga kerja.

Dari data tersebut, menjelaskan bahwa akibat pandemi COVID-19, beberapa sektor usaha melakukan Pemecatan terhadap pekerjanya. Para tenaga kerja yang banyak kehilangan pekerjaan mereka di tengah keterlambatan ekonomi saat pandemi ini. Sektor terbanyak yang melakukan tindakan PHK yaitu sektor informal yang mencapai angka 71,7 juta orang. Dikutip dari nasional.kontan.co.id jumlah karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan sejumlah lebih dari 1,5 juta karyawan, dengan

spesifikasi karyawan sektor formal lebih besar dari pada sektor informal, yaitu sejumlah 1,2 juta karyawan dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal.

Diwilayah Sumatera Barat berdasarkan Badan Pusat Statistik angka Pengangguran dari Agustus 2019 sebesar 144,35 ribu orang dan meningkat pada Agustus 2020 sebanyak 190,61 ribu orang, yang kalau dipersentasikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 5,38 persen dan tahun 2020 sebesar 6,88 persen. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 1,50 persen Tingkat pengangguran di Sumatera Barat meningkat akibat Pandemi Covid-19. Sementara itu berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi telah tercatat pada tahun 2019 tingkat pengangguran sebanyak 6,20 persen dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 7,51 persen. Dapat diambil kesimpulan sebanyak 1,31 persen tingkat pengangguran meningkat.

Untuk Kota Bukittinggi sebagai kota perdagangan dan kota pariwisata, pada kondisi Pandemi Covid-19 ini menyebabkan terhentinya sementara waktu perdagangan dan pariwisata akibat PSBB. Pembatasan yang diberikan oleh pemerintah ini guna memutus rantai penularan Covid-19 yang ada di Kota Bukittinggi. Terhentinya perdagangan di Kota Bukittinggi juga berdampak pada ekonomi masyarakat yang menurun.

Berdasarkan Hal Tersebut Penulis tertarik mengambil judul “ Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial Bagi Keluarga yang terdampak Pandemi Covid-19 oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi “

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah rumah tangga penerima Bantuan Sosial selama Pandemi di Kota Bukittinggi ?
2. Bantuan Sosial apa saja yang diterima oleh keluarga yang terdampak pandemi di Kota Bukittinggi ?
3. Bagaimana Prosedur Pencairan dana Bantuan Sosial bagi keluarga yang terdampak pandemi di Kota Bukittinggi ?
4. Siapa Organisasi atau Badan yang mengelola Bantuan Sosial saat ini di Kota Bukittinggi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari kegiatan penulisan tugas akhir ini penulis dapat menarik beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan jumlah rumah tangga penerima Bantuan Sosial selama Pandemi di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui Bantuan Sosial apa saja yang diterima oleh keluarga yang terdampak pandemi di Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pencairan dana Bantuan Sosial bagi keluarga yang terdampak pandemi di Kota Bukittinggi.
4. Untuk mengetahui Organisasi atau Badan yang mengelola Bantuan Sosial saat ini di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

- a. Mempersiapkan sikap profesionalisme yang ada didalam diri untuk memasuki lapangan kerja.
- b. Menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan ke kehidupan sehari-hari

2. Bagi Instansi

Sebagai saran dan kritikan yang sifatnya membangun dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik kedepannya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan ini penulis mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Keperpustakaan

Penulis mencari, mempelajari dan mengumpulkan data dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

2. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian melalui eksplorasi langsung ke Badan Keuangan Kota Bukittinggi sehingga memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

3. Pencarian data melalui internet

Penulis mencari materi dan bahan-bahan penunjang dengan mengunjungi website yang memberikan informasi kepada penulis sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan penulis

1.6 Metode Analisis Data

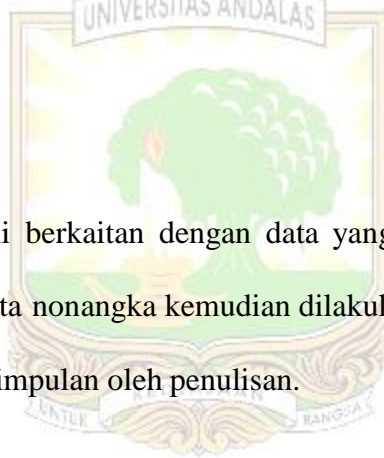
Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum dan kecenderungan data yang dipakai yaitu :

1. Data Kuantitatif

Metode analisa dilakukan secara bersamaan. Yang mana saat penulis mendapatkan data, penulis menggunakan data tersebut sebagai perbandingan antara data yang didapatkan dengan data teori yang ada di *literature* sehingga informasi yang diperoleh dari instansi tersebut dapat mengetahui pokok masalah yang sebenarnya, apasaja penyebab dan dampak apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

2. Data Kualitatif

Metode analisa data ini berkaitan dengan data yang didapatkan dari organisasi atau instansi yang berupa data nonangka kemudian dilakukan penganalisaan dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan oleh penulisan.



1.7 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika yang digunakan penulis dalam penulisan laporan ini terdiri dari :

Bab 1 : Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan analisa data serta sistematika penulisan

Bab II : Landasan Teori

Berisikan tentang landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan

mengenai pengertian prosedur, pengertian pencairan dana, dan pengertian Bantuan Sosial (BANSOS)

Bab III : Gambaran Umum

Berisikan tentang gambaran umum dari organisasi tempat dilakukannya kegiatan magang yaitu Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang berisi tentang sejarah terbentuknya Badan Keuangan, visi dan misi, fungsi, kedudukan Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan struktur Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Bab IV : Pembahasan

Memberikan pembahasan tentang hasil kegiatan yang dilakukan selama magang terkait tentang “ Prosedur Pencairan Dana Bantuan Sosial Bagi Keluarga yang terdampak Pandemi Covid 19 oleh Badan Keuangan”.

Bab V : Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan permasalahan yang dibahas, kemudian dilengkapi dengan saran yang sifatnya membangun dan berguna untuk perbaikan dan perubahan dimasa depan nantinya

